

**ANALISIS KELEMBAGAAN NELAYAN KAPAL SLEREK DI DESA PENGAMBENGAN
KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBARANA BALI:
STUDI HUBUNGAN KERJA DAN DINAMIKA PENDAPATAN NELAYAN**

***(INSTITUTIONAL ANALYSIS OF SLEREK BOAT FISHERMEN IN THE VILLAGE OF
PENGAMBENGAN, DISTRICT OF NEGARA, REGENCY OF JEMRANA BALI:
STUDY OF WORKING RELATIONS AND INCOME DYNAMICS OF FISHERMEN)***

Agus Purwanto^{1*)}, Yvonne I. Pattinaja², Leopold A. Tomasila²

¹ Program Studi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana

² Program Studi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku

*)Penulis korespondensi: guspur83@gmail.com

Diterima 22 November 2021, disetujui 14 Desember 2021

ABSTRAK

Hubungan ekonomi yang terjalin diantara pemilik modal dan nelayan akan menimbulkan perubahan kelembagaan yang dipatuhi bersama untuk menjaga kelangsungan kegiatan penangkapan ikan. Kelembagaan yang terjadi pada masyarakat pesisir merupakan interaksi antara pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu seperti kesejahteraan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisa kelembagaan pada usaha penangkapan ikan menggunakan Kapal Slerek terkait pola hubungan kerja dan dinamika pendapatan 2) Menganalisa dampak kelembagaan tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif ini diperoleh data bahwa kelembagaan yang terbentuk pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek merupakan hasil interaksi secara terus menerus sehingga tercipta sebuah pola aturan main (*rules of the games*) tidak tertulis yang berasal dari kesepakatan para pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Kelembagaan terkait hubungan tenaga kerja di dominasi oleh kesepakatan antara juragan darat, juragan laut dan penambak. Hubungan kerja yang paling menonjol tampak pada sistem bagi hasil yang terdiri atas tiga sistem yaitu sistem bagi terang bulan, sistem bagi tiga dan sistem bersih pantai. Kelembagaan terkait dinamika pendapatan dipengaruhi oleh harga ikan, jumlah hasil tangkapan, sistem bagi hasil yang diterapkan, biaya operasional. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kelembagaan ekonomi pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek terhadap penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam satu pasang kapal slerek adalah 46 orang.

Kata kunci: dinamika pendapatan, hubungan kerja, kapal slerek, kelembagaan ekonomi.

ABSTRACT

Economic relations between capital owners and fishermen will lead to institutional changes that are obeyed together to maintain the continuity of fishing activities. Institutional that occurs in coastal communities is an interaction between economic agents to achieve certain goals such as welfare. The purposes of this study are 1) Analyzing institutions in fishing efforts using Slerek boat related to working relationship patterns and income dynamics 2) Analyzing the institutional impact on the employment of coastal communities. Based on the results of this qualitative research obtained data that the institutions formed in fishing business activities using slerek boat are the result of continuous interaction so that an unwritten pattern of rules of the games (rules of the games) is created that comes from the agreement of the economic agents involved in it. Institutional related labor relations are dominated by agreements between land, sea and patching skippers. The most prominent working relationships appear in the profit-sharing system consisting of three systems, namely the system for the light of the moon, the system for three and the clean system of the beach. Institutional related income dynamics are influenced by fish prices, the number of catches, the revenue sharing system implemented, operational costs. The impact caused by the existence of economic institutions on fishing business activities using slerek boat to the absorption of labor is the amount of labor needed in one pair of slerek boat is 46 people.

Keywords: income dynamics, employment relations, slerek boat, institutional economy.



Cara sitasi: Purwanto, A., Pattinaja, Y. L., Tomasila, L. A. 2021. Analisis Kelembagaan Nelayan Kapal Slerek di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembarana Bali: Studi Hunungan Kerja dan Dinamika Pendapatan Nelayan. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 5(2), 77-85, DOI: <https://doi.org/10.30598/papalele.2021.5.2.77/>

PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan merupakan salah satu sektor yang masih perlu diperhatikan. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan wilayah pesisir melalui berbagai kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi umumnya dilakukan dengan menekankan peranan modal alam (*natural capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*) dengan mengabaikan modal sosial seperti kelembagaan lokal, kearifan lokal, norma-norma dan kebiasaan lokal. Pengembangan masyarakat pesisir diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan nelayan dengan melakukan program pemberdayaan nelayan dengan menggunakan pola pendekatan yang berbasis penguatan kelembagaan ekonomi, pemberdayaan kemampuan masyarakat dan memaksimalkan potensi lokal.

Dalam struktur masyarakat pesisir, nelayan kerap menempati level bawah khususnya nelayan kecil dan nelayan buruh yang seringkali dikatakan sebagai kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan nelayan merupakan siklus peristiwa sosial ekonomi yang selalu berulang sepanjang tahun. Menurut Suyanto dalam Hakim (2009) menyatakan bahwa kehidupan nelayan cenderung rentan terhadap guncangan atau dapat dikatakan kebutuhan mendadak akan menyebabkan nelayan menjadi *collapse*.

Faktor penyebab kerentanan yang tinggi dapat berasal dari akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai dari musim yang sulit di prediksi, rendahnya pengetahuan nelayan tentang teknologi, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya pengetahuan tentang akses terhadap permodalan, serta hubungan ekonomi yang eksploitatif dengan penyedia modal informal dan belum berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi seperti TPI/KUD Mina secara optimal untuk membantu usaha nelayan (Kusnadi, 2003). Kompleksitas permasalahan tersebut berpengaruh terhadap pendapatan

nelayan dan menjadikan nelayan semakin berada pada kondisi yang memprihatinkan dan jauh dari kata sejahtera.

Kompleksitas permasalahan yang dijabarkan oleh Kusnadi (2003) tersebut menyebabkan terbukanya peluang untuk pemodal masuk ke dalam kehidupan nelayan. Pemodal dalam hal ini dapat menjadi pemilik modal sekaligus pemilik teknologi. Sehingga akan tercipta sebuah hubungan ekonomi antara pemilik modal dan nelayan pekerja. Hubungan ekonomi ini dapat berupa hubungan kerja sama (kelembagaan) antara pemilik modal dan nelayan. Terbentuknya hubungan ekonomi antara pemilik modal, pemilik teknologi dan nelayan merupakan salah satu strategi untuk menjaga keberlangsungan kegiatan nelayan.

Hubungan ekonomi yang terjalin diantara pemilik modal dan nelayan akan menimbulkan perubahan kelembagaan (*rules of the game*) yang dipatuhi bersama untuk menjaga kelangsungan kegiatan penangkapan ikan. Kelembagaan yang terjadi pada masyarakat pesisir merupakan interaksi antara pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu seperti kesejahteraan.

Salah satu wilayah pesisir yang menjadi fokus perhatian pemerintah di Provinsi Bali yaitu pesisir di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Kegiatan penangkapan ikan di daerah pengembangan banyak di dominasi oleh Kapal Slerek yang menggunakan alat penangkapan *purse seines*. Kapal Slerek merupakan kegiatan penangkapan yang banyak membutuhkan modal dan pekerja. Sehingga dalam penelitian ini kapal slerek dijadikan fokus pengambilan data untuk menguraikan hubungan kerja dan dinamikan pendapatan yang terjadi akibat terbentuknya kelembagaan antara pelaku ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisa kelembagaan pada usaha penangkapan ikan menggunakan Kapal Slerek terkait pola hubungan kerja dan dinamika pendapatan; dan



2) Menganalisa dampak kelembagaan tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Agustus 2021 di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Bali dengan mengambil fokus pada usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengambilan data primer akan dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara dan teknik *Focus Group Discussion* (FGD).

Data primer dalam penelitian ini terdiri atas data tentang pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan ekonomi usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek, pola kelembagaan yang terbentuk, pola hubungan kerja dan bagi hasil, dinamika pendapatan serta dampak kelembagaan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja pada masyarakat Desa Pengambangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan pelaku ekonomi terkait pendapatan yang diperoleh dari usaha penangkapan tersebut. Dalam penelitian kualitatif semua keadaan dilapangan menjadi penting. Menurut Creswell (1994) peneliti akan berusaha memahami kondisi subyek penelitiannya dengan menggunakan kerangka berpikirnya sendiri. Proses analisis data kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Sedangkan untuk mengukur keabsahan data kualitatif digunakan triangulasi sumber dan teori. Menurut Moleong (2009), validasi data dengan menggunakan metode triangulasi dilakukan untuk membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada sumber berbeda dan diwaktu berbeda serta membandingkannya dengan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Usaha Penangkapan Ikan (Kapal Slerek) Terkait Pola Hubungan Kerja dan Dinamika Pendapatan

Kelembagaan terbentuk sebagai akibat dari adanya interaksi ekonomi di antara para

pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek. Interaksi tersebut membentuk sebuah pola hubungan berdasarkan kesepakatan atau tata aturan yang telah berlangsung terus menerus dan telah menjadi sebuah tradisi atau budaya.

Aturan dan kesepakatan tersebut dapat berupa kontrak tertulis atau tidak tertulis yang telah disepakati menjadi sebuah pedoman dan membentuk sebuah pola kelembagaan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Yeager 1999 yang mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya sehingga dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan selama enam bulan di Desa Pengambangan, ada beberapa pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal slerek, yaitu:

1. Kapal slerek, merupakan 2 (dua) buah kapal penangkap ikan yang dalam operasi penangkapannya secara bersama-sama atau berpasangan dengan pembagian 1 (satu) buah kapal digunakan khusus untuk membawa jaring dan 1 (satu) buah lagi digunakan untuk membawa hasil tangkapan.
2. Juragan Darat, merupakan sebutan bagi pemilik kapal atau pemilik modal.
3. Juragan Laut, merupakan sebutan lain dari nahkoda kapal yang memiliki kewenangan untuk mengatur kapal dan ABK selama kegiatan penangkapan ikan di laut.
4. ABK, adalah anak buah kapal yang dipilih oleh juragan laut untuk membantunya bekerja di atas kapal. ABK yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal slerek kurang lebih 25-30 orang dengan rincian tukang kemudi, tukang mesin, tukang timah, tukang slerek, dan tukang pelak.
5. Panol, merupakan kelompok pekerja yang bertugas mengangkut hasil tangkapan dari kapal menuju tempat penimbangan ikan atau pengangkutan. Panol tidak ikut melaut, melainkan menunggu di darat.
6. Penguras, bertugas untuk mengurus kebersihan kapal setelah beroperasi,



merawat kapal dan menjaga kapal saat kapal tidak beroperasi.

7. Pengurus, biasanya pengurus merupakan wakil dari juragan darat yang bertugas untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk keberangkatan kapal misal pembelian bahan bakar minyak (solar), pembelian es dan lain-lain. Selain itu, pengurus bertugas melakukan negosiasi harga ikan dengan penambak atau perusahaan saat terjadi penjualan hasil tangkapan.
8. Penambak, merupakan sebutan untuk seseorang yang melakukan pembelian ikan dari hasil tangkapan nelayan. Jika di tempat lain, sebutannya bisa tengkulak ataupun pengepul.

Kelembagaan ekonomi yang terbentuk menghasilkan kesepakatan, norma dan tata aturan yang mengatur jalannya kegiatan ekonomi penangkapan ikan menggunakan

perahu slerek dengan tujuan untuk memberikan hasil ekonomi yang semaksimal mungkin untuk para pelaku ekonomi yang terlibat. Tata aturan tersebut mengakibatkan terbentuknya pola hubungan kerja di antara pelaku ekonomi dan adanya dinamika pendapatan nelayan.

Kelembagaan Terkait Hubungan Kerja

Pembahasan mengenai hubungan kerja meliputi aturan main (*rules of the game*) yang menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain. Bentuk kerjasama tersebut akan terjalin di antara juragan darat, juragan laut, ABK, panol, pengurus, pengurus dan penambak. Hubungan kerja tersebut berupa kesepakatan sistem kerja, pembagian hasil, dan penentuan harga ikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaku yang berperan dalam norma terkait hubungan kerja yaitu:

Tabel 1. Peran Pelaku Ekonomi Dalam Membentuk Norma Hubungan Kerja

| No. | Norma | Pelaku Ekonomi yang Berperan | Kesepakatan yang dibentuk |
|-----|------------------------|--|---|
| 1. | Sistem Kerja | - Juragan darat - Juragan laut | - Juragan darat dan juragan laut akan membentuk kesepakatan untuk menentukan kapan waktu kapal bekerja atau tidak. - Juragan laut memiliki kewenangan untuk memilih ABK yang akan membantunya bekerja. - Juragan laut memiliki kewenangan untuk mengatur sistem kerja di atas kapal selama kapal beroperasi |
| 2. | Sistem Pembagian Hasil | - Juragan darat - Juragan laut | - Juragan darat dan juragan laut akan membentuk kesepakatan untuk menentukan sistem bagi hasil (akan dijelaskan lebih lanjut) - Juragan darat akan memberikan tambahan penghasilan pada juragan laut (diluar sistem bagi hasil yang sudah disepakati) |
| 3. | Penentuan Harga | - Juragan darat/Pengurus - Penambak | - Juragan darat memberikan kepercayaan kepada pengurus untuk melakukan negosiasi harga dengan penambak |

Berdasarkan uraian pada Tabel 1, dapat terlihat bahwa pembentukan norma hubungan kerja pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek didominasi oleh kesepakatan yang terjadi di antara tiga pelaku ekonomi yaitu juragan darat, juragan laut dan penambak.

Dalam observasi diperoleh data bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal slerek ada tiga pola, yaitu:

1. Sistem Bagi Terang Bulan

Sistem bagi terang bulan merupakan sistem pembagian hasil yang dilakukan dengan cara mengurangi hasil penjualan dengan biaya



operasional, kemudian hasil dari pengurangan tersebut di bagi dua untuk juragan darat dan prapatan. Prapatan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan selain juragan darat seperti juragan laut, ABK, dan pengurus.

Sistem bagi terang bulan, biasanya dilakukan setiap kali setelah mendapatkan hasil penjualan. Hasil pembagian tersebut akan diberikan setiap hari atau di akhir bulan, tergantung dari kebutuhan anak buah. Pembagian harian biasanya lebih disukai karena anak buah dapat langsung menikmati hasil kerjanya saat itu juga.

Contoh perhitungan pembagian hasil dengan sistem bagi terang bulan, yaitu: semisal hasil penjualan adalah 300 juta dengan biaya operasional 50 juta. Hasil penjualan setelah dikurangi biaya operasional tersisa 250 juta, yang dibagi 125 juta untuk juragan darat dan 125 juta untuk ABK.

Pembagian hasil untuk ABK disesuaikan dengan jabatan atau tingkat pekerjaannya dalam kegiatan penangkapan ikan, seperti:

- a. Juragan laut, akan mendapatkan empat point
- b. Tukang kemudi, mendapatkan tiga point
- c. Tukang mesin, mendapatkan dua point
- d. Tukang timah, mendapatkan dua point
- e. Tukang slerek, mendapatkan satu point
- f. Tukang pelak, mendapatkan satu point
- g. Pengurus, mendapatkan satu point
- h. Penguras, mendapatkan satu point

2. Sistem Bagi Tiga

Pada sistem ini, hasil penjualan ikan akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu untuk biaya operasional, juragan darat dan ABK. Contoh perhitungan pembagian hasil dengan sistem ini yaitu semisal hasil penjualan adalah 300 juta, dibagi 100 juta untuk biaya operasional, 100 juta untuk juragan darat dan 100 juta untuk ABK. Pembagian hasil untuk ABK, menyesuaikan dengan tingkatan/point seperti penjabaran pada sistem bagi terang bulan.

Apabila ternyata dalam kenyataannya biaya operasional melebihi hasil bagi, misal biaya operasional adalah 125 juta, maka

kekurangan biaya operasional sebesar 25 juta akan menjadi tanggungan bersama antara juragan darat dan ABK. Sedangkan apabila biaya operasional lebih rendah dari hasil pembagian, kelebihan biaya operasional akan dibagi bersama atau menjadi simpanan untuk operasional berikutnya.

3. Sistem Bersih Pantai

Pembagian hasil dengan sistem bersih pantai dilakukan dengan mengurangi hasil penjualan dengan semua pengeluaran yang ada di pantai seperti pembelian es, pembayaran panol, pembelian lampu, senter, dan lain-lain. Selisih dari pengurangan tersebut yang kemudian akan dibagi tiga sebagaimana pada sistem bagi tiga yaitu untuk biaya operasional, juragan darat dan ABK. Biaya operasional yang dimaksud dalam sistem ini yaitu khusus pembelian bahan bakar minyak.

Hasil penjualan pada ketiga sistem pembagian hasil tersebut dihitung setelah hasil penjualan ikan dikurangi dengan dua hal yaitu 1) 10% untuk biaya penyusutan kapal, mesin dan jaring, 2) 8% untuk biaya penguras.

Berikut akan disajikan kelebihan dan kekurangan ketiga sistem pembagian hasil yang digunakan dalam kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Bali.

Pada ketiga sistem bagi hasil, nelayan kapal slerek di Desa Pengambangan lebih menyukai sistem bagi hasil yang system bagi tiga.

Kelembagaan Terkait Dinamika Pendapatan

Pada uraian kelembagaan terkait hubungan kerja, terlihat bahwa norma hubungan kerja yang terbentuk mempengaruhi pendapatan pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek. Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan nelayan antara lain:

1. Harga ikan

Dalam kegiatan perikanan di mana penawaran produk cenderung stabil, maka harga ikan akan dipengaruhi oleh permintaan (Febrianti, 2015). Perubahan permintaan pada



umumnya disebabkan oleh adanya fluktuasi harga yang terjadi (Samuelson & Nordhous, 1999). Jumlah permintaan ikan segar, tergantung dari kondisi industri pada perusahaan pengolahan hasil perikanan dan kebutuhan pasar ikan segar. Selain jumlah

permintaan, harga ikan akan ditentukan oleh jenis ikan yang ditangkap.

Penentuan harga ikan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara juragan darat (diwakili oleh pengurus) dan penambak. Kesepakatan harga biasanya dipengaruhi oleh kualitas ikan dan permintaan pasar.

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Pada Sistem Bagi Hasil

| No. | Sistem Bagi Hasil | Kelebihan | Kekurangan |
|-----|----------------------|---|--|
| 1. | Sistem Terang Bulan | - ABK akan langsung menikmati hasil kerjanya - Tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak (Juragan darat dan ABK) | - Pembagian hasil untuk ABK sedikit karena hasil penjualan sudah dikurangi dengan biaya operasional, bisa jadi ABK tidak dapat bagian apabila biaya operasional lebih tinggi dari pendapatan |
| 2. | Sistem Bagi Tiga | - ABK akan diuntungkan karena pembagian hasil tanpa dikurangi biaya operasional - ABK akan tetap mendapatkan pembagian hasil meskipun terjadi minus pada biaya operasional | - Biaya operasional yang minus menjadi tanggungan bersama |
| 3. | Sistem Bersih Pantai | - Kekurangan biaya operasional tidak terlalu tinggi, karena hasil penjualan sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan | - Pembagian hasil untuk ABK sedikit karena hasil penjualan sudah dikurangi dengan biaya operasional |

2. Jumlah hasil tangkapan

Jumlah hasil tangkapan dipengaruhi oleh musim dan keberhasilan menentukan area penangkapan ikan. Dalam hal ini, kemampuan juragan laut/nahkoda dalam menentukan area penangkapan sangat menentukan hasil tangkapan. Kemampuan tersebut bisa dihasilkan oleh kebiasaan atau kemampuan menggunakan teknologi. Jumlah hasil tangkapan merupakan pengali dari harga ikan sehingga menentukan besarnya pendapatan dari kegiatan usaha ini.

3. Sistem bagi hasil

Pemilihan sistem bagi hasil akan menentukan besarnya pendapatan yang akan diterima oleh juragan darat dan ABK. Sistem bagi hasil memiliki perhitungan pembagian hasil yang berbeda.

4. Besarnya Biaya operasional

Biaya operasional akan mengurangi hasil penjualan yang bisa dibagikan kepada juragan darat dan ABK. Besarnya biaya operasional ditentukan oleh harga dan jumlah pemakaian BBM, harga dan jumlah es serta biaya-biaya lain.

Selain sistem bagi hasil yang sudah disepakati, ada sebuah norma yang menjadi kesepakatan antara juragan darat dan juragan laut yang mempengaruhi pendapatan. Juragan darat akan memberikan bonus kepada juragan laut. Besarnya bonus ditentukan oleh nilai setiap point pembagian pada ABK di kali dengan hasil kesepakatan keduanya. Semisal, dari hasil perhitungan pembagian hasil, pembagian point pada ABK sebesar Rp 1.000.000, dan pengali yang disepakati adalah 9 point, maka bonus yang akan diberikan oleh juragan darat pada juragan laut adalah Rp



1.000.000 x 9 yaitu Rp 9.000.000,-. Bonus yang diberikan ke juragan laut ini akan dibagi ke ABK yang memiliki jabatan tukang kemudi 2 point, tukang mesin 1 point, tukang slerek 1 point.

Juragan darat juga memberikan bonus kepada pengurus sebesar 5% dari hasil yang diterima oleh juragan darat. Pengurus, yang merupakan wakil dari juragan darat, memiliki tugas mengurus penjualan ikan, mengatur penimbangan ikan, mencatat hasil yang

diperoleh, melakukan negosiasi harga ikan serta menyiapkan logistik (perbekalan) sebelum kapal berangkat.

Dampak Kelembagaan Usaha Penangkapan Ikan (Kapal Slerek) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir

Berdasarkan hasil pengamatan, kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek dapat digambarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kesempatan Kerja Pada Kegiatan Penangkapan Ikan Kapal Slerek

| No. | Kegiatan | Kebutuhan Jumlah Tenaga Kerja (orang) | Kualifikasi Yang Dibutuhkan |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Juragan Laut | 1 | |
| 2. | Tukang kemudi | 2 | |
| 3. | Tukang mesin | 2 | Disesuaikan jumlah mesinnya |
| 4. | Tukang timah | 3 | |
| 5. | Tukang Slerek | 7 | |
| 6. | Tukang pelak | 1 | |
| 7. | Tukang Tarik jaring | 12 | |
| 8. | Pengurus | 2 | |
| 9. | Penguras | 4 | |
| 10. | Panol | 12 | |
| Total Tenaga Kerja | | 46 | |

Keterangan: Jumlah tenaga kerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada kapal slerek dengan ukuran 10-20 GT.

Berdasarkan data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek mampu menyerap tenaga kerja 46 orang. Menurut data dari Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Pengambengan, jumlah kapal slerek di Desa Pengambengan sebanyak 51 pasang, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek adalah 2.346 orang.

Penyerapan tenaga kerja yang dijabarkan pada Tabel 3 masih terbatas pada kebutuhan tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek. Namun, pada kenyataannya kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya memberi dampak ekonomi pada pelaku ekonomi yang terlibat secara langsung, sekaligus memberi *multiplier effect* (Efek domino) pada kegiatan lain yang turut mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegiatan

usaha yang juga turut mendukung seperti usaha pengadaan es, penyedia BBM, penyedia sarana prasarana penangkapan ikan, warung makan di sekitar pelabuhan, transportasi, kegiatan penambak dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kelembagaan yang terbentuk pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek merupakan hasil interaksi secara terus menerus sehingga tercipta sebuah pola aturan main (*rules of the games*) tidak tertulis yang berasal dari kesepakatan para pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Kelembagaan tersebut merupakan kelembagaan non formal yang mempengaruhi pola hubungan kerja dan dinamika pendapatan masyarakat pesisir, dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil pendapatan.

Kelembagaan terkait hubungan tenaga kerja di dominasi oleh kesepakatan antara



juragan darat, juragan laut dan penambak. Hubungan kerja yang paling menonjol tampak pada sistem bagi hasil yang terdiri atas tiga sistem yaitu sistem bagi terang bulan, sistem bagi tiga dan sistem bersih pantai. Kelembagaan terkait dinamika pendapatan dipengaruhi oleh harga ikan, jumlah hasil tangkapan, sistem bagi hasil yang diterapkan, biaya operasional.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kelembagaan ekonomi pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek terhadap penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam satu pasang kapal slerek adalah 46 orang. Sedangkan *multiplier effect* yang ditimbulkan mencakup beberapa kegiatan ekonomi seperti usaha pengadaan es, penyedia BBM, penyedia sarana prasarana penangkapan ikan, warung makan di sekitar pelabuhan, transportasi, kegiatan penambak dan lain-lain.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi seperti pembentukan pola kelembagaan ekonomi terkait hubungan kerja dan dinamika pendapatan di dominasi oleh kesepakatan di antara juragan darat, juragan laut dan penambak, pembentukan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar dari kegiatan tersebut serta *multiplier effect* dari kegiatan tersebut terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat pesisir. Pelaksanaan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian sejenis dengan mengambil fokus yang berbeda seperti adanya *multiplier* efek dari keberadaan HSRT di wilayah pesisir terhadap pergerakan ekonomi disekitarnya dan Dinamika pendapatan nelayan kapal slerek dalam musim yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Bardhan, Pranab. 1989. *Alternative Approaches to the Theory of Institutions in Economic Development*. Clarendon Press. Oxford

- Commons, John R. 1931. *Institutional Economics*. *American Economic Review*. Vol. 21, Issue 4, December: 648-657
- Cresswell, J.W. 1994. *Research Design: Quantitative and Qualitative Approach*. London: Sage
- Erwidodo, Syukur, Rachman, Gatoet. 1993. *Evaluasi Perkembangan Tingkat Upah di Sektor Pertanian*. Monograph. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa. Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Manning, C. 1992. Survey Recent Development. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*. 32 (1). Indonesian Project. The Australian University.
- Manning, C and S. Jaya Suriya. 1996. Survey Recent Development. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*. 32 (1). Indonesian Project. The Australian University.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- North, Douglass C. 1990. Institutions and Transaction-cost Theory of Exchange. Dalam James E. Alt and Kenneth A. Shepsle. *Perspective on Positive Political Economy*. Cambridge University Press. Cambridge
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1999. *Ekonomi Edisi Keduabelas*. Terjemahan A. Jaka Wasana M. Jakarta: Erlangga
- Spare, A. Jr and Harris. 1996. Education Farming and Migration in Indonesia. *Economic Development and Cultural Change*. Vol. 34, No.2, 1996. The University of Chicago Press. Illionis
- Sumardi, Muldjanto. 1982. *Sumber Pendapatan Kebutuhan Pokok dan*



- Prilaku Menyimpang*. CV. Rajawali, Jakarta
- White, B. 1992. Population Involution and Employment in Rural Java, in Haris, (Ed) Rural Development: Theories of Peasant Economy and Agrarian Change. Ruthdge. London
- Yeager, Timothy J. 1999. *Institutions, Transition Economies, and Economic Development*. Political Economy of Global Interdependence. Oxford
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori & Strategi*. Malang: Bayu Media.
- Vatn, Arild. 2006. *Institutions*. Departement of Economics and Resource Management Norwegian University of Life Sciences. http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions_Arild_Vatn.pdf [di akses tgl 7 Agustus 2021].

